

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah Membuat :

Persetudjuan Pembantu Menteri Bidang Pendidikan tanggal 17 Djuli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tanggal 8 Djuli 1964 No.394/AV/Um/64 tentang pembukaan, pemetjohan dan penegerian S.M.A. tahun peladjaran 1964/1965.-

Menimbang :

- a. bahwa berhubung bertambah banjaknja hasrat dari para murid jang telah lulus udjian achir S.M.P. Negara tahun 1963/1964 untuk melandjutkan peladjaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negara;
- b. bahwa S.M.A. Negara jang telah terlampau besar sehingga penjelenggaraan pengadjaran/tidak dapat berdjalan lantjar, dipandang perlu dipetjah mendjadi dua buah sekolah Negara jang masing-masing berdiri sendiri; / nja
- c. bahwa S.M.A. 2 Swasta jang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah Negara dan jang sesuai dengan rentjana penjebaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selajaknja dinegerikan mendjadi S.M.A. 2 Negara;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selandjutnja ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu membuka, memetjah dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1964/1965;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan Pendidikan;
2. Undang-Undang art.4 th.1950 jo. Undang-Undang No.12 th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
3. Undang-Undang No.32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah landjutan Negara;
4. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125409/S tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan sekolah landjutan Negara;
5. Perumusan rentjana peladjaran S.M.A. gaja baru jang berlaku dan wajib didjalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962.
6. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA : Membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas" selandjutnja disingkat S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- KEDUA : Memetjah S.M.A. Negara ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini mendjadi dua buah sekolah jang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang tehnik kependidikan.
- KETIGA : Menegerikan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III keputusan ini mendjadi S.M.A. Negara setempat ;

Kecempat : .....



KEEMPAT

: Terhadap pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. a. Belanja dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. & K belum bisa menediakan, maka gedung2, halaman sekolah, mobil dan alat2 perlengkapan lainnya didjamin/ ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat. / dan
- b. Segala penagihan2 yang bersifat keperdataan termasuk perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya S.K. ini tetap menjadi tanggungan Panitia Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. a. Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan.
- b. Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau guru-guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D dan K.
4. Terhadap Sekolah2 yang dimerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid2 dikenakan ketentuan2 tentang pengadjar, pegawai, dan murid2 negara, dengan tjetatan bagi yang tidak memenuhi syarat, penjurannya menjadi tanggung djawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatip dari sekolah yang bersangkutan.
5. Khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki ijazah S.M.P. Negara dan yang memenuhi syarat2 ketentuan2 lain dari pedoman bust penerimaan murid yang diterbitkan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962. / atau
6. a. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspektorat S.M.A.
- b. Tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid.

KE-LIMA

: Djikalau syarat-syarat tsb. diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka/ sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesobannya sebagai sekolah negara atau menghetikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I. / kiranya

KEENAM

: Biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya S.K. ini, sekedar untuk tahun 1964 dibebankan pada pasal 8E.3.13. dari anggaran belanja pada Departemen P.D dan K th.1964. dan untuk tahun2 selanjutnya pada nota anggaran yang selaras dengan itu.

KETUJUH

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1964.



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEJUJARAN R.I.  
ATAS NAMA MENTERI :

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN UMUM

ATAS NAMA BELIAU :

INSPEKTORAT TATA - LAKSANA,



( B A S I R A N )



- n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Personalia dan Organisasi.
- o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Materil dan Keuangan.
- 20. Lembaga Penyelidikan dan Penelitian ( 3expl.)
- 21. Direktorat Pendidikan Kedjuruan ( 3 expl.)
- 22. Direktorat Pendidikan Tehnik ( 3 expl.)
- 23. Direktorat Pendidikan Guru/Tenaga ( 3 expl.)
- 24. Direktorat Pendidikan Umum:
  - a. Semua Inspektorat.
  - b. Semua Urusan dari Inspektorat Tata - Laksana.  
(untuk Hubungan Masyarakat, Perpustakaan dan Dokumentasi 5 expl.)  
/ Urusan
- 25. A r s i p .-

-----  
Type: MHN.



SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Theasouri Negeri Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri (K.P.N) di: Medan, Djambi, Palembang, Teluk Betung, Banda Atjeh (Atjeh), Padang, Pekanbaru, Bandung, Djakarta, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Palu, Kendari, Palangka Raya, Samarinda, Singaradja (Bali), Denpasar (Bali), Ambon.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negeri Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 expl.)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl. Dr. Soetomo No.8 di Djakarta (2 expl.)
9. D.P.R. - G.R. "Eomisi J" (Seksi Pendidikan) di Djakarta (10 expl.)
10. Walikota di: Djambi, Makassar, Palembang, Bandung, Tjirebon, Jogjakarta, Surabaya, Samarinda.
11. Kepala Daerah tingkat I di: Djambi, Palembang, Banda Atjeh (Atjeh), Padang, Medan, Telukbetung (Lampung), Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Makassar, Manado, Palu (Sulawesi Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Singaradja (Bali), Ambon.
12. Kepala Daerah tingkat II di: Djambi; Tjurup (Sumatera Selatan); Lubuklinggau, Kabupaten Musi-Rawas (Sumatera Selatan); Palembang; Lho'seumawe, Kabupaten Atjeh Utara (Atjeh); Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan (Atjeh); Bindjai, Kabupaten Langkat (Sumatera Utara); Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara); Demak; Djepara; Bantul (Jogjakarta); Krawang; Djatinegara; Bandung; Garut; Tjirebon; Wonosari (Jogjakarta); Ponorogo; Patjitan; Surabaya; Pandeglang; Denpasar (Bali); Gianjar (Bali); Klungkung (Bali); Karangasem (Bali); Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Tandjung Selor, Kabupaten Dulongan (Kalimantan Timur); Makassar; Sungguminasa (Sulawesi Selatan); Palu, Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah); Kabupaten Tanah Toradja (Sulawesi Selatan); Donthain (Sulawesi Selatan); Sindjai (Sulawesi Selatan); Bau-Bau, Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara); Raha, Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara); Maros, Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan); Polewali, Kabupaten Polewali (Sulawesi Selatan); Mamudju, Kabupaten Mamudju (Sulawesi Selatan); Kolaka, Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara); Tahuna, Kabupaten Sangihe-Talaud (Sulawesi Utara); Ambon (Maluku); Kab. Minahasa (Sul. Ut.);
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Djambi, Palembang, Banda Atjeh (Atjeh), Padang, Medan, Telukbetung (Lampung), Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Makassar, Manado, Palu (Sulawesi Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Singaradja (Bali), Ambon.
14. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Djambi; Tjurup (Sumatera Selatan); Lubuklinggau, Kabupaten Musi-Rawas (Sumatera Selatan); Palembang; Lho'seumawe, Kabupaten Atjeh-Utara (Atjeh); Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan (Atjeh); Bindjai, Kabupaten Langkat (Sumatera Utara); Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Sumatera Utara); Demak; Djepara; Bantul (Jogjakarta); Krawang; Djatinegara; Bandung; Garut; Tjirebon; Wonosari (Jogjakarta); Ponorogo; Patjitan; Surabaya; Pandeglang; Denpasar (Bali); Gianjar (Bali); Klungkung (Bali); Karangasem (Bali); Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Tandjung Selor, Kabupaten Dulongan (Kalimantan Timur); Makassar; Sungguminasa (Sulawesi Selatan); Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara); Palu, Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah); Kabupaten Tanah Toradja (Sulawesi Selatan); Donthain (Sulawesi Selatan); Sindjai (Sulawesi Selatan); Bau-Bau, Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara); Raha, Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara); Maros, Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan); Polewali, Kabupaten Polewali (Sulawesi Selatan); Mamudju, Kabupaten Mamudju (Sulawesi Selatan); Kolaka, Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara); Tahuna, Kabupaten Sangihe-Talaud (Sulawesi Utara); Ambon (Maluku);
15. Perwakilan Departemen P.U. dan K. Daerah tingkat I di: Djambi, Palembang, Banda Atjeh (Atjeh), Medan, Padang, Teluk Betung (Lampung), Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Manado, Palu (Sulawesi Tengah), Makassar, Kendari (Sulawesi Tenggara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Singaradja (Bali), Denpasar (Bali), Ambon.
16. Kepala ...



16 Kepala / Peminpin:

- S.M.A. Negara II di Djambi.
  - S.M.A. Negara di Demak, Djawa Tengah.
  - S.M.A. Negara di Djepara, Djawa Timur. *Kengoh*
  - S.M.A. Negara di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin-Darat, Kalimantan Tengah.
  - S.M.A. Negara IV di Makassar, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Bantul, Jogjakarta.
  - S.M.A. Negara di Tjurup, Sumatera Selatan.
  - S.M.A. Negara di Lubuklinggau, Kabupaten Muzi-Rowas, Sumatera Selatan.
  - S.M.A. Negara di Mamuju, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara I di Palembang, Sumatera Selatan.
  - S.M.A. Negara di Sekoju, Kabupaten Muzi-Banjasin, Sumatera Selatan.
  - S.M.A. Negara di Krawang, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara V di Bandung.
  - S.M.A. Negara di Tjimai, Kabupaten Bandung, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Gerut, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Leles, Kabupaten Garut, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Tjirebon, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Palimanan, Kabupaten Tjirebon, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara Teladan di Jogjakarta.
  - S.M.A. Negara di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Jogjakarta.
  - S.M.A. Negara di Ponorogo, Djawa Timur.
  - S.M.A. Negara di Patjitan, Djawa Timur.
  - S.M.A. Negara I di Surabaya, Djawa Timur.
  - S.M.A. Negara di Wonokromo, Kabupaten Surabaya, Djawa Timur.
  - S.M.A. Negara di Samarinda, Kalimantan Timur.
  - S.M.A. Negara di Tarakan, Kabupaten Bulongan, Kalimantan Timur.
  - S.M.A. Negara di Langowan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
  - S.M.A. Negara di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
  - S.M.A. Negara di Palu, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.
  - S.M.A. Negara di Donggala, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
  - S.M.A. Negara di Rantepao, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Makale, Kabupaten Tanah Toradja, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Bonthain, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Sindjai, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Bau-Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
  - S.M.A. Negara di Rahe, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
  - S.M.A. Negara di Denpasar, Bali.
  - S.M.A. Negara di Gianjar, Bali.
  - S.M.A. Negara di Bireuen, Kabupaten Atjeh Utara, Atjeh.
  - S.M.A. Negara di Blangpidie, Kabupaten Atjeh Selatan, Atjeh.
  - S.M.A. Negara di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sum.-Utara.
  - S.M.A. Negara di Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
  - S.M.A. Negara di Pandeglang, Kabupaten Serang, Djawa Barat.
  - S.M.A. Negara di Maros, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Polewali, Sulawesi Selatan.
  - S.M.A. Negara di Sanana, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
  - S.M.A. Negara di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
  - S.M.A. Negara di Klungkung, Bali.
  - S.M.A. Negara di Karangasem, Bali.
  - S.M.A. Negara di Deo, Kabupaten Sangihe-Tolaud, Sulawesi Utara.
- Departemen Agama, Djl. Thamrin, Djakarta (5 expl.)  
Departemen Olah Raga, Djl. Djenderal Sudirman, Djakarta (5 expl.)  
Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No.4 di Djakarta:
- a. Pembantu Chusus Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
  - b. Biro Urusan Pemuda.
  - c. Biro Publisistik, Statistik dan Dokumentasi:
    - 1. Seksi Statistik ( 3 expl.)
    - 2. Seksi Dokumentasi ( 3 expl.)
    - 3. Seksi Publikasi (untuk disiarkan).
  - d. Biro Hukum dan Perundang-undangan (10 expl.)
  - e. Biro Pengawas/Keuangan. / an
  - f. Biro Keuangan (10 expl.)
  - g. Biro Urusan Sokongan.
  - h. Biro Administrasi Pegawai C-I (5 expl.)
  - i. Biro Kesedjahteraan Pegawai.
  - j. Biro Urusan Dalam dan Korjawan.
  - k. Biro Perbekalon.
  - l. Biro Danganan.
  - m. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Pendidikan.

n. Sekretaris...



No.	Nama dan tempat sekolah yang dipetjah	Dipetjah menjadi	Djumlah keles	Keterangan
3.	S.M.A. Negara di Krawang	a. S.M.A. Negara di Krawang. b. S.M.A. Negara di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	12 buah	
4.	S.M.A. Negara V di Bandung.	a. S.M.A. Negara V di Bandung. b. S.M.A. Negara di Cimahi, Kabupaten Bandung, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	12 buah	
5.	S.M.A. Negara di Garut.	a. S.M.A. Negara di Garut. b. S.M.A. Negara di Leles, Kabupaten Garut, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	8 buah	
6.	S.M.A. Negara di Tjirebon.	a. S.M.A. Negara di Tjirebon. b. S.M.A. Negara di Palimanan, Kabupaten Tjirebon, Daerah Tingkat I Jawa Barat.	10 buah	
7.	S.M.A. Negara Teladan di Jogjakarta.	a. S.M.A. Negara Teladan di Jogjakarta. b. S.M.A. Negara di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta.	8 buah	
8.	S.M.A. Negara di Ponorogo.	a. S.M.A. Negara di Ponorogo. b. S.M.A. Negara di Patjitan, Kabupaten Patjitan, Daerah Tingkat I Jawa Timur.	4 buah	
9.	S.M.A. Negara I di Surabaya.	a. S.M.A. Negara I di Surabaya. b. S.M.A. Negara di Wonokromo, Kabupaten Surabaya, Daerah Tingkat I Jawa Timur.	4 buah	
10.	S.M.A. Negara di Samarinda.	a. S.M.A. Negara di Samarinda. b. S.M.A. Negara di Tarakan, Kabupaten Bulong, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	6 buah	
				11. S.M.A. Negara..



LAMPIRAN I : Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.  
tgl. 30 Djuli 1964 No.79/S.K/D/III.

TENTANG : Pembukaan S.M.A. Negara tahun pelad-  
ajaran 1964/1965.-

No.	Nama dan tempat sekolah yang dibuka	Djumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.A. Negara II di Djambi, Kabupaten Djambi, Daerah Tingkat I Djambi.	4 buah	
2.	S.M.A. Negara di Demak, Kabupaten Demak, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	6 buah	Sebelumnja adalah S.M.A. Persiapan Negara di Demak.
3.	S.M.A. Negara di Djepara Kabupaten Djepara, Daerah Tingkat I Djawa Tengah	10 buah	Sebelumnja adalah S.M.A. Persiapan Negara di Djepara.
4.	S.M.A. Negara di Pangkajene, Kabupaten Kotawaringin Barat, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah	6 buah	
5.	S.M.A. Negara IV di Makassar, Kabupaten Makassar, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	12 buah	Sebelumnja adalah S.M.A. Persiapan Negara di Makassar.
6.	S.M.A. Negara di Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.	12 buah	Sebelumnja adalah S.M.A. Persiapan Negara di Bantul.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Atas nama Menteri:  
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,  
Atas nama Beliau :  
Kepala Inspektorat Tata - Laksana,



*(Signature)*  
( J. HASIRAN ).-

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Menteri P.D. & K.  
tgl. 30 Djuli 1964 No.79/S.K/D/III

TENTANG : Pemetjahan S.M.A. Negara tahun  
peladjaran 1964/1965.-

No.	Nama dan tempat sekolah yang dipetjeh	Dipetjeh mendjadi	Djumlah kelas.	Keterangan
1.	S.M.A. Negara di Tjurup, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	a. S.M.A. Negara di Tjurup. b. S.M.A. Negara di Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.	10 buah	
2.	S.M.A. Negara I di Palembang.	a. S.M.A. Negara I di Palembang. b. S.M.A. Negara di Sekaju, Kabupaten Musi-Banjuarasin, Daerah Tingkat I	10 buah	



No.	Nama dan tempat sekolah yang dinegerikan	Djumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.A. J.P.D. di Bireuen Kabupaten Atjeh Utara, Daerah Istimewa Atjeh.	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Bireuen.
2.	S.M.A. Persiapan Negara di Blangpidie, Kabupaten Atjeh Selatan, Daerah Istimewa Atjeh.	6 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Blangpidie.
3.	S.M.A. Persiapan Negara di Pangkolan Brandon, Kabupaten Langkat, Daerah Tingkat I Sumatera Utara	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Pangkolan Brandon.
4.	S.M.A. Persiapan Negara di Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Porsea.
5.	S.M.A. Kusuma Bangsa di Pandeglang, Kabupaten Serang, Daerah Tingkat I Djawa Barat.	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Pandeglang.
6.	S.M.A. di Maros, Kabupaten Maros, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	10 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Maros.
7.	S.M.A. di Polewali, Kabupaten Polewali, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Polewali.
8.	S.M.A. J.P.S. di Sanana, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Tingkat I Maluku.	6 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Sanana.
9.	S.M.A. di Mamudju, Kabupaten Mamudju, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	8 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Mamudju.
10.	S.M.A. di Kolaka, Kabupaten Kolaka, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	10 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Kolaka.
11.	S.M.A. di Klungkung, Kabupaten Klungkung, Daerah Tingkat I Bali.	12 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Klungkung.
12.	S.M.A. di Karangasem, Kabupaten Karangasem, Daerah Tingkat I Bali	12 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Karangasem.
13.	S.M.A. di Deo, Kabupaten Sangihe-Taloud, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara	10 buah	Mendjadi S.M.A. Negara di Deo.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia

Atas nama Menteri:  
 Kepala Direktorat Pendidikan Umum,

Atas nama Beliau :  
 Kepala Inspektorat Tata Laksana,



(J. N. S. T. W.)



No.	Nama dan tempat sekolah yang dipetjeh	Dipetjeh menjadi	Djumlah kelas	Keterangan
11.	S.M.A. Negara di Langowan Kabupaten Minahasa, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	a. S.M.A. Negara di Langowan. b. S.M.A. Negara di Kawankoran, Kabupaten Minahasa Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	6 buah	
12.	S.M.A. Negara di Palu Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	a. S.M.A. Negara di Palu. b. S.M.A. Negara di Danggala, Kabupaten Donggala, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	6 buah	
3.	S.M.A. Negara di Rantepao Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	a. S.M.A. Negara di Rantepao. b. S.M.A. Negara di Makale, Kabupaten Tana Toradja, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	6 buah	
14.	S.M.A. Negara di Bontobain Kabupaten Bontobain, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	a. S.M.A. Negara di Bontobain. b. S.M.A. Negara di Sindjai, Kabupaten Sindjai, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	6 buah	
5.	S.M.A. Negara di Bau-Bau Kabupaten Buton, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	a. S.M.A. Negara di Bau-Bau. b. S.M.A. Negara di Raha, Kabupaten Muna, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	6 buah	
5.	S.M.A. Negara di Denpasar Daerah Tingkat I Bali.	a. S.M.A. Negara di Denpasar. b. S.M.A. Negara di Gianjar, Kabupaten Gianjar, Daerah Tingkat I Bali.	12 buah.	

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia  
 Atas nama Menteri:  
 Kepala Direktorat Pendidikan Umum.  
 Atas nama Beliau :  
 Kepala Inspektorat Tata-Laksana,



*J. Basiran*  
 ( J. BASIRAN ).-